

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perempuan masih dianggap belum dapat berkontribusi secara utuh di dalam ruang politik, kehadirannya pun masih dianggap sebatas menjadi pemenuhan kursi belaka. Pemikiran ini tidaklah terlepas dari bagaimana budaya patriarki dan adanya opini publik menggambarkan bahwa perempuan tidaklah seharusnya berkontribusi di dalam ruang publik, melainkan perempuan telah di konstruksi menjadi makhluk domestik yang hanya dianggap keberadaannya saat dalam ranah rumah tangga (Dapur, sumur, kasur). Permasalahan budaya yang masih bersifat patriarki inilah yang menjadi permasalahan pokok untuk perempuan saat menunjukkan dirinya ke wilayah publik. Seperti yang dikatakan oleh Elizabeth Frazer dalam artikelnya, perempuan kadang masih dianggap kaku untuk memasuki wilayah prerogatif milik laki-laki seperti politik, dimana laki-laki dianggap lebih pantas untuk menjadi seorang wakil rakyat ataupun dianggap lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu wilayah bahkan negara (Frazer, 2009). Kurangnya fasilitas seperti pendidikan politik untuk perempuan menjadi salah satu faktor lainnya. Pendidikan ini pula menjadi suatu faktor yang dapat mempengaruhi proses kesadaran berpikir manusia menjadi lebih hidup dengan banyaknya pemikiran-pemikiran kritis yang menunjang bagaimana manusia itu sendiri dapat memecahkan permasalahan secara proses kognitifnya ia berpikir (Mustapa, Maelani, & Saifullah, 2019). Pendidikan politik dianggap sangatlah penting untuk perempuan, karena disana perempuan bisa belajar bagaimana dirinya berpartisipasi di dalam politik, berperan aktif dalam penyelenggaraan politik. Dengan itu perempuan bisa menyadari akan haknya sendiri di dalam politik, seperti dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya, secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya., dan juga pada Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.". Selain itu, pemerintah Indonesia melakukan upaya seperti terlibat

dalam ratifikasi terhadap sejumlah konvensi nasional/internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Beijing Declaration and Platform for Action* (BDPA), pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan sejumlah kebijakan dan undang-undang untuk penghapusan berbagai diskriminasi gender dan pembangunan manusia berbasis gender.

Dalam realitasnya di Indonesia meskipun ada sebuah peraturan tentang keterlibatan perempuan dalam ranah politik yang tertuang pada UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 2, ayat (2), “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Lalu ayat (5), “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”, serta dipasal 20 “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”. Hal tersebut sebagai sebuah pintu utama perempuan dapat berkiprah dalam ranah politik khususnya dalam partai politik.

Tidak hanya itu, disusul dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menegaskan bahwa partai politik dapat mengikuti kontestasi setelah terpenuhi syarat yang menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan, bahkan dalam undang-undang ini mengatur adanya *zipper system* yang mengatur bahwa tiap tiga bakal calon harus terdapat minimal satu orang perempuan seperti dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8, ayat (1D), “Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. *Zipper System* terdapat dalam Pasal 55,

ayat (2), “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

Namun pada kenyataannya angka 30% ini tidaklah menjadi terisi sepenuhnya, seperti dalam data Pusakapol UI keseluruhan dari anggota legislatif yang terpilih di tingkat DPRD Jawa Barat adalah 120 orang dan 23 orang diantaranya adalah perempuan, sedangkan 97 orang lainnya adalah laki-laki. Posisi perempuan hanya menempati 19,1% dari posisi seluruhnya dan terhitung dalam masing-masing partai hanya terisi 21.1% perempuan yang menjadi anggota legislatif terpilih di DPRD Jawa Barat.

Tabel 1.1

Anggota DPR Jawa Barat 2019-2024

NO	Anggota Legislatif Terpilih di DPRD Jawa Barat	Partai
1	Hj. Siti Muntamah, S.Ap.	PKS
	Hj. Sari Sundari, S.Sos.	
2	Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn.	PDIP
	Dra. Hj. Elin Suharliah, M.Si.	
	Hj. Asyanti Rozana Thalib, S.E.	
	Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M.	
	Hj. Sumiyati, S.Pd.I.	
	Hj. Iis Turniasih	
3	Dra. Hj. Ijah Hartini	GOLKAR
	Hj. Cucu Sugyati, S.E., M.M.	
	Hj. Sri Rahayu Agustina, S.H.	
4	Ade Puspitasari, S.Sos., M.B.A.	NASDEM
	Dra. Hj. Tia Fitriani	
5	Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, S.T., M.E.Sy.	PAN
	Dessy Susilawati, S.Pd.I.	
6	Hj. Lilis Boy	DEMOKRAT
7	Dra. Lina Ruslinawati	GERINDRA

	Ir. Prasetyawati, M.M.	
	Hj. Tina Wiryawati, S.H.	
	Hj. Gina Fadlia Swara, S.E., M.M.	
8	Erni Sugiyanti, S.Ag.	PKB
	Yuningsih	
9	Hj. Neng Madinah Ruhiat	PPP

Dalam Lingkup Jawa Barat posisi perempuan belum sepenuhnya menempati posisi yang setara dalam kedudukan partisipasi perempuan dalam politik. Selain dalam dunia parlemen, ada pula beberapa perempuan yang memasuki wilayah eksekutif dan memiliki peran sebagai kepala/wakil daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah masing-masing dalam lingkup Jawa Barat, terdapat tujuh perempuan yang diantaranya empat orang perempuan menjadi Bupati di Kabupaten Bogor yaitu Ade Yasin, Kabupaten Indramayu yaitu Nina Agustina, Kabupaten Karawang yaitu Cellica Nurrachadiana dan Kabupaten Purwakarta yaitu Anne Ratna Mustika, serta satu orang perempuan yang menjadi Wakil Bupati di Cirebon yaitu Wahyu Tjiptaningsih (Prov, 2020). Selain dari itu terdapat satu orang perempuan menjadi Wali Kota di Kota Banjar yaitu Ade Uu Sukaesih (Erianto, 2022). Dan satu lainnya menjadi Wakil Wali Kota di Kota Cirebon yaitu Eti Herawati (Baehaqi, 2018). Posisi tersebut tentu belumlah menjadi sebuah pencapaian besar perempuan dalam ranah politik, akan tetapi menjadi sebuah kemenangan kecil yang dapat ditempuh oleh perempuan di dalam lingkup Jawa Barat

Tabel 1.2

Daftar Kepala/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	Jabatan	Nama Kepala/Wakil Kepala Daerah	Partai
1	Bupati Kab. Bogor	Ade Yasin	PPP
2	Bupati Kab. Indramayu	Nina Agustina	<u>PDIP</u>

3	Bupati Kab. Karawang	Cellica Nurrachadiana	DEMOKRAT
4	Bupati Kab. Purwakarta	Anne Ratna Mustika	GOLKAR
5	Wakil Bupati Kab. Cirebon	Wahyu Tjiptaningsih	PDIP
6	Wali Kota Banjar	Ade Uu Sukaesih	GOLKAR
7	Wakil Wali Kota Cirebon	Eti Herawati	NASDEM

Lalu bagaimana dengan porsi dari partisipasi perempuan di Kota/Kabupaten di provinsi Jawa Barat dimana penulis berencana membuat sebuah penelitian di Kota Bandung, karena sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki wilayah yang strategis dan juga yang menjadi salah satu barometer pergerakan perempuan yang lumayan massif. Sebagai ibukota provinsi Jawa Barat apakah Kota Bandung memiliki ekosistem politik yang ramah perempuan? Khususnya dalam ranah parlementer, perempuan yang menduduki kursi legislatif daerah yaitu di dalam DPRD Kota Bandung adalah delapan (8) orang perempuan dari 50 orang anggota legislatif yang terpilih, sisanya 42 orang adalah laki-laki. Posisi perempuan hanya terisi 16% dari keseluruhan dan masing-masing partai rata-rata hanya menempati 19,6% dalam lima partai dari sembilan partai terpilih keseluruhan dan ada empat partai yang tidak terdapat perempuan di DPRD Kota Bandung yaitu PKB, Nasdem, PPP, dan PSI. Dari posisi kedudukan menjadi Kepala Daerah dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung tersebutlah terdapat partai Golkar, Demokrat, PDIP, PKS dan Gerindra yang konsisten memiliki kesadaran massa untuk memilih serta menempatkan kader perempuan terbaiknya di dalam posisi legislatif ataupun eksekutif tingkat daerah setempat.

Tabel 1.3

Daftar Anggota DPRD Kota Bandung 2019-2024

NO	Anggota Legislatif Terpilih di DPRD Kota Bandung	Partai
1	Nenden Sukaesih	GOLKAR
2	Rieke Suryaningsih, SH	PDIP
3	Salmiah Rambe, S. Pd. I	PKS
	Siti Nurjanah	
	Susi Sulastri	
4	drg. Maya Himawati	GERINDRA
	Nunung Nurasiah	
5	Dr. Rini Ayu Susanti	DEMOKRAT

Salah satu dari lima partai besar yang berhasil dalam proses pendistribusian politik dalam wilayah Kota Bandung adalah Partai Golkar. Partai Golkar sudah dirintis sejak Orde Lama. Di tahun 1957, kehadirannya menjadi sebuah pembaruan politik pada zaman Orde Baru. Partai ini sebelumnya bernama bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan oleh Soeharto dan Suhardiman di tanggal 20 Oktober tahun 1964 Dalam pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar telah memperoleh 62,8% suara hingga memenuhi 236 kursi dari 360 kursi dalam anggota DPR (Partai Golongan Karya). Dalam tahun-tahun selanjutnya, terhitung dalam kurun waktu 32 tahun, Golkar dapat mempertahankan elektabilitasnya menjadi partai politik yang memiliki partisipan dan anggota hingga dalam lingkup pemerintahan Desa dengan berafiliasi melalui lembaga KORPRI. Pergolakan politik memuncak hingga kemunduran Soeharto menjadi presiden di tahun 1998. Pasca reformasi elektabilitas partai Golkar menurun, diakibatkan dengan adanya beberapa konflik internal partai pasca reformasi yang dalam selang beberapa tahun menimbulkan perpecahan dari beberapa orang dalam beberapa gerbong di partai itu sendiri dan banyak melahirkan partai-partai baru, seperti Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) sekarang Partai Keadilan & Persatuan (PKP), Partai Gerindra, Partai Nasdem,

Partai Berkarya, dan Partai Hanura. Meski ditengah turbulensi politik pasca reformasi tidak menjadikan Golkar semakin redup karna Golkar ditopang dengan beberapa kekuatan massanya yang terbagi dalam tiga golongan yaitu golongan pengusaha, golongan militer dan golongan santri.

Selain itu, dalam masa berdirinya, Golkar ditopang oleh kekuatan pada basis massa yang berjumlah kurang lebih 150 ribu kader yang terdiri dari beberapa simpatisan Sekber Golkar dari 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Organisasi simpatisan Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan menjadi 7 bagian berdasarkan kekaryaannya kedalam Kelompok Induk Organisasi (KINO) yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong 1957 (KOSGORO 1957), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) dan Gerakan Pembangunan. Tujuh Kino inilah yang menjadi kekuatan inti Sekber Golkar dan mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut serta menjadi peserta pemilu dan berfokus pada kemenangan Golkar. Sebutan lain dalam masa pasca reformasi Partai Golkar resmi memiliki dua turunan yang disebut sebagai Tri Karya atau Hasta Karya sebagai organisasi masyarakat yang memiliki keterikatan historis atas kelahiran Sekber Golkar yang terdiri dari KOSGORO 1957, MKGR dan SOKSI, serta memiliki Ormas Sayap yang terdiri dari 7 sayap yaitu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Satuan Karya Ulama Indonesia, Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Himpunan Wanita Karya, Pengajian Al – Hidayah. Seluruh Hasta Karya dan ormas sayap ini sebagai kekuatan Partai Golkar untuk mencapai stabilitasnya dalam pengorganisasian massa dengan melakukan kaderisasinya masing-masing (Effendy, Thohari, Novianto, Alfian, & Dkk, 2012).

Salah satu sayap Partai Golkar yang telah berhasil dalam proses pendistribusian kader-kadernya kedalam ranah politik khususnya legislatif dan eksekutif adalah Kesatuan Perempuan Partai Golkar atau biasa dikenal dengan KPPG. KPPG lahir bersama dengan dibentuknya sayap pemuda partai pada tahun

2002 dalam RAPIMNAS ke-5 Partai Golkar (Partai Golongan Karya). KPPG difokuskan untuk pemberdayaan kepada kader perempuan, selain itu sebagai wadah konsolidasi untuk memperkuat gerakan Partai Golkar dalam rangka penggalangan massa kelompok strategis perempuan hal tersebut diupayakan juga untuk membesarkan dan memajukan Partai Golkar dalam meraup massa.

Selain dari itu KPPG sebagai wadah pendidikan politik bagi kader perempuan Partai Golkar ada suatu tempat yang seharusnya menjadi sebuah sumbu utama dimana perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya sendiri di dalam ruang khusus. Dari datang yang telah disajikan sebelumnya menjadi sebuah gambaran kecil proses secara umum tentang keterlibatan perempuan di dalam politik khususnya dalam lingkup eksekutif dan legislatif. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pola pendidikan politik yang dibangun oleh sayap partai Golongan Karya (Golkar) dalam tingkat kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bandung yaitu KPPG Kota Bandung. Adapun hal tersebut dilihat dari urgensi kesadaran partisipasi perempuan di dalam KPPG Kota Bandung yang dimana dalam tahun 2019-2024 hanya terisi satu bangku legislatif dalam lingkup lokal di DPRD Kota Bandung. Angka tersebut masih menjadi sebuah angka yang minim dibandingkan dengan Partai PKS dan Partai Gerindra yang memiliki lebih dari satu keterwakilan perempuan di dalam lingkup DPRD Kota Bandung. khususnya di dalam pendidikan politik bahwa proses advokasi yang mengantarkan perempuan pada ranah politik dapat membuka ruang untuk perempuan berpartisipasi secara aktif serta mewujudkan kehidupan politik yang lebih demokratis. Penguatan dari segi pendidikan politik juga dipakai sebagai penguatan kepada anggota partai terutama terhadap aktor yang memiliki peran untuk di distribusikan sebagai pimpinan eksekutif, legislator ataupun posisi strategis lainnya dalam rangka memberikan dan menguatkan keterwakilan perempuan untuk serta diaplikasikan sebagai proses implementasi dan formulasi untuk lebih meningkatkan kontribusi perempuan di dalam politik (Virgianita, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya KPPG Kota Bandung dalam memberikan pendidikan politik bagi kader perempuan partai Golkar?
2. Bagaimana hambatan KPPG Kota Bandung dalam memberikan pendidikan politik bagi kader perempuan partai Golkar?
3. Bagaimana pola rekrutmen perempuan di dalam KPPG Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya KPPG Kota Bandung dalam memberikan pendidikan politik bagi kader perempuan partai Golkar.
2. Untuk mengetahui hambatan KPPG Kota Bandung dalam memberikan pendidikan politik bagi kader perempuan partai Golkar.
3. Untuk mengetahui strategi rekrutmen politik sebagai hasil dari output pendidikan politik yang diberikan oleh KPPG Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini kemudian bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya juga memperluas dari khazanah keilmuan khususnya dalam Ilmu Politik yang menganalisis bagaimana sayap perempuan partai yang menjadi bagian khusus dalam partai politik dapat membuat sebuah pendidikan politik yang menyesuaikan dengan kebutuhan serta hak perempuan dalam berpolitik yang menjadi salah satu instrumen dari kemunculan proses demokrasi yang lebih egaliter dan memperhatikan aspek keadilan gender di dalam ranah politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah khazanah keilmuan bagi praktisi khususnya perempuan yang akan terjun kedalam dunia politik, terlebih menjadi

gambaran dan usaha dalam menciptakan partisipasi politik bagi perempuan melalui pendidikan politik yang dibuat oleh partai politik ataupun lembaga politik lainnya.

1.5 Batasan Penelitian

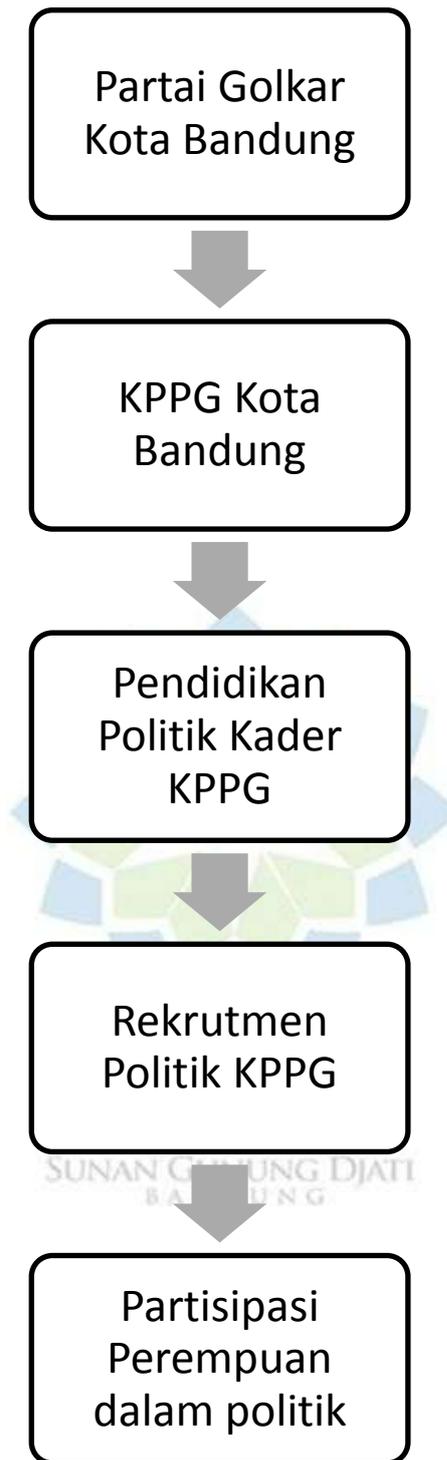
Partai Golkar merupakan partai yang memiliki eksistensi dan stabilitas yang cukup tinggi dari awal pembentukannya hingga saat ini di Indonesia, terlihat dari beberapa aspek yang menopang Golkar secara basis massa, hal itu tentu menjadi sebuah strategi kuat yang dimiliki oleh Golkar secara kultural, dari hal tersebut proses kaderisasi internal lah yang kemudian membangun kesadaran politik bagi setiap kader Partai Golkar. Terkhusus kepada kader perempuan, penelitian ini dibatasi dengan permasalahan pendidikan politik yang terdapat di KPPG Kota Bandung sebagai salah satu sayap perempuan partai dan sekaligus membahas pola rekrutmen calon anggota legislatif ataupun eksekutif atau pendistribusian kader ke ranah organisasi masyarakat sebagai bentuk advokasi nyata hasil pendidikan politik yang telah dibangun dalam pendistribusian kader perempuan partai Golkar Kota Bandung melalui sayap partai, KPPG Kota Bandung.

1.6 Kerangka Berpikir

Secara garis besar, pendidikan politik dijadikan sebuah sarana sosialisasi politik, hal ini dikenal sebagai suatu usaha dalam memberikan sebuah pendidikan tentang hak politik, urgensi partisipasi masyarakat di dalam dunia politik. Jika menurut Kartini Kartono dalam bukunya, pendidikan politik sebagai upaya yang disengaja dan dibuat sistematis guna membentuk individu yang mampu berpartisipasi dan tanggung jawab secara etis/moralnya dalam proses pencapaian tujuan politik bersama (Kartono, 1996). Pendidikan politik ini tentu menjadi sebuah wadah ataupun cara untuk memaksimalkan potensi masyarakat umum ataupun kader partai dengan meningkatkan partisipasi mereka dalam berpolitik, seperti mengetahui hak politik, tugas/fungsi suatu lembaga ataupun hal-hal yang berkaitan dengan manajerial kepemimpinan, khususnya kepada perempuan yang

secara gender ataupun sex (jenis kelamin) memiliki sebuah pengalaman biologis yang berbeda dengan laki-laki dan juga konstruksi dimana perempuan tidaklah cocok untuk menjadi sosok yang dapat berkontribusi dalam ranah politik. Hal tersebut tentu menjadi keliru jika masyarakat patriaki tidak memberikan perempuan ruang untuk mengaktualisasikan dirinya secara penuh dan pendidikan politik bagi perempuan inilah yang sesungguhnya menjadi sebuah aspek yang penting untuk diteliti, karna hal ini memiliki kesamaan dengan salah satu fungsi partai Golkar yaitu; Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Partai Golongan Karya). Fungsi tersebut tentu dimaksimalkan dengan kehadiran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai salah satu sayap partai yang di dalamnya menaungi kader perempuan Golkar.

Peran untuk menyelenggarakan pendidikan politik perempuan inilah yang sudah seharusnya dilakukan oleh KPPG khususnya dalam lingkup Kota Bandung yang menjadi peranan penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Pendidikan politik ini pun tentu harusnya menghasilkan sebuah advokasi yang nyata untuk terus menciptakan generasi pembaharu yang menciptakan sebuah ekosistem politik yang demokratis serta egaliter. Hal tersebut dapat ditinjau dari proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai guna mendistribusikan kadernya dalam lingkup yang lebih luas, seperti memasuki ranah eksekutif ataupun legislatif sebagai pemimpin daerah. Menurut Gabriel Almond, proses rekrutmen inilah yang menjadi tempat dimana rakyat dapat mengikuti kegiatan politik dan posisi strategis dalam pemerintahan, hal ini biasa ditempuh melalui seleksi ataupun menjadi anggota di dalam organisasi melalui pendidikan atau pelatihan tertentu. Pola rekrutmen inilah yang juga menjadi salah satu gambaran dari keberhasilan pendidikan politik yang diselenggarakan dalam suatu lembaganya (Labolo & Ilham, 2015).



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir